KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR** **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**	**NOMOR SOP : W.32.OT.02.02-58** **TGL PEMBUATAN : 22 Januari 2022** **TANGGAL RE** **TANGGAL EF 2022** **DISAHKAN O ANTOR WILAYAH** **SEDE SURYA MATARAM** **031991031001**
BIDANG HAK ASASI MANUSIA	**NAMA SOP : FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPERSPEKTIF HAM DI WILAYAH**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 3 Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perudang-undangan 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;	1. Mengerti dan Memahami Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia 2. Mengerti dan Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif HAM
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengiriman surat koordinasi 2. SOP Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan 3. SOP Penyelenggaraan Rapat 4. SOP Penyampaian Rekomendasi Kabupaten/Kota Peduli HAM	1. Komputer/ Printer/ Scanner 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Jaringan Internet 4. Buku-buku terkait HAM dan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi pelanggaran HAM	Arsip data, hard disk/drive, *hard copy*

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KAKANWIL	KADIV YANKUMHAM	KABID HAM	PEMPROV	PEMDA KAB/KOTA	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memerintahkan Kadiv yankum untuk melaksanakan telaahan produk hukum daerah						DIPA dan TOR	10 menit	Disposisi	
2.	Meneruskan disposisi Kakanwil tentang pelaksanaan telaahan produk hukum daerah						DIPA dan TOR	10 menit	Disposisi	
3.	Mengajukan surat koordinasi dengan Pemprov terkait pelaksanaan telaahan produk hukum daerah						Disposisi surat	1 hari	Konsep surat koordinasi	
4.	Menyetujui surat koordinasi pelaksana an telaahan produk hukum daerah		T				Konsep surat koordinasi	1 hari	Konsep surat koordinasi	
5.	Menyetujui surat koordinasi pelaksana an telaahan produk hukum daerah	T	Y				Konsep Surat Koordinasi	1 hari	Surat Koordinasi	
6.	Meneruskan surat pelaksanaan telaahan produk hukum daerah ke Pemda Kab/Kota	Y					Surat Koordinasi	1 hari	Disposisi dan surat koordinasi	
7.	Menerima surat ko-ordinasi dan mem-berikan rekapitulasi produk-produk hukum Daerah kepada Ka. Kanwil Kemenkum-ham						Disposisi dan surat koordinasi	1 hari	Rekapitulasi produk hukum	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KAKANWIL	KADIV YANKUMHAM	KABID HAM	PEMPROV	PEMDA KAB/KOTA	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
8.	Menerima dan meneruskan rekapi tulasi produk hukum daerah kepada Kadiv Yankumham						Surat koordinasi Rekapitulasi produk hukum	1 hari	Disposisi	
9.	Memerintahkan pelaksanaan rapat penelaahan produk-produk hukum Daerah						Rekapitulasi produk hukum	1 hari	Inventaris produk hukum	
10.	Melaksanakan rapat penelaahan produk-produk hukum Daerah						Inventaris produk hukum	60 hari	Produk hukum yang bernuansa HAM	
11.	Menyampaikan rekomendasi terkait produk hukum daerah yang belum berperspektif HAM						Rekapitulasi produk hukum	1 hari	Produk hukum yang belum bernuansa HAM	

